KATALOG BPS : 4102004.7111

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

2015

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KOTAMOBAGU

http://kotamobagukota.bps.go.id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
BOLAANG MONONDOW TIMUR
WELFARE INDICATORS OF BOLAANG MONGONDOW TIMUR
2015

ISBN

Nomor Publikasi

Katalog BPS

Ukuran Buku 18 X 25 cm

Jumlah Halaman 68 halaman

Naskah
Zepri Ageng Pamuji, S.Si

Editor

Gambar Kulit

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

http://kotamobagukota.bps.go.id

http://kotamobagukota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Kota Kotamobagu sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Bolaang Mongondow Timur 2015.**

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Kota Kotamobagu yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2015. Terdapat perbedaan referensi waktu antara publikasi ini dengan publikasi sebelumnya karena ada perubahan metodologi susenas.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Kotamobagu, 1 Desembaer 2016
Kepala,

Ir. Didik Tjahjawinardi

http://kotamobagukota.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		viii
1.	KEPENDUDUKAN	1
	1.1 Jumlah,Laju Pertumbuhan Penduduk,dan Rasio Jenis Kelamin	1
	1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	4
	1.3 Angka Beban Ketergantungan	6
	1.4 Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama	10
	1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	12
2.	KESEHATAN DAN GIZI	15
	2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	15
	2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	16
	2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	19
3.	PENDIDIKAN	25
	3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	26
	3.2 Rata-rata Lama Sekolah	29
	3.3 Tingkat Pendidikan	31
	3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)	32
4.	KETENAGAKERJAAN	37
	4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	37
	4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	39

http://kotamobagukota.bps.go.id

	4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	40
	4.4	Jumlah Jam Kerja	42
5.		TARAF DAN POLA KONSUMSI	43
	5.1	Pengeluaran Rumah Tangga	43
6.		PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	47
	6.1	Kualitas Rumah Tinggal	47
	6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	50
	6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	51
7.		KEMISKINAN	55
	7.1	Perkembangan Kemiskinan	56
	7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	57
8.		SOSIAL LAINNYA	59
	8.1	Perjalanan Wisata	60
	8.2	Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	61
	8.3	Kredit usaha	62
	8.4	Tindak Kejahatan	63

http://kotamobagukota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Bolaang Mongondow Timur 3

1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2015 6

1.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2014 - 2015 13

KESEHATAN DAN GIZI

2.1 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah, 2015 22

PENDIDIKAN

3.1 Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2015 27

3.2 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara 30

3.3 Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015 31

3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015 33

3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2015 34

3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2015 34

KETENAGAKERJAAN

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 - 2015 36

4.2 Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 40

4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja (Ribu), 2013 - 42

http://kotamobagukota.bps.go.id

2015

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015 44

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2014–2015 48

6.2 Rumahtangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015 51

KEMISKINAN

7.1 Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Utara, 2014 - 2015 58

SOSIAL LAINNYA

8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015 60

http://kotamobagukota.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1	Komposisi Luas Kota dan Luas Kabupaten di Bolaang Mongondow Timur, 2015	5
1.2	Komposisi Penduduk Bolaang Mongondow Timur (persen), 2010-2015	7
1.3	Angka Beban Ketergantungan, 2010 – 2015	8
1.4	Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015	9
1.5	Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015	11
2.1	Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2015	16
2.2	Anak Usia kurang dari 2 tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015	17
2.3	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015	18
2.4	Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015	19
2.5	Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Bolaang Mongondow Timur (persen), 2015	20
3.1	Harapan Lama Sekolah, 2010-2015	27
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015	39
4.2	Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015	41
5.1	*Gini Ratio* menurut Kabupaten/Kota, 2015	46
6.1	Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota, 2015	52

http://kotamobagukota.bps.go.id

7.1 Persentase Penduduk Miskin, 2011 - 2014 56

8.1 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP, menggunakan Komputer dan Mengakses Internet (persen), 2015 62

8.2 Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015 63

http://kotamobagukota.bps.go.id

1. KEPENDUDUKAN

Pada hakikatnya pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pada taraf perencanaan dan pelaksanaannya tentunya akan menyentuh aspek kependudukan, karena penduduk merupakan subjek sekaligus obyek pembangunan. Seperti diketahui bersama bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Masalah kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan, kesehatan yang layak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada daerah yang belum maju dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah

http://kotamobagukota.bps.go.id

penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumahtangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang dapat menunjukkan tentang kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah secara umum, berdasarkan hasil Sensus penduduk (SP) 2010 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang mongondow timur, sebesar 1,56 persen, dan tercatat jumlah penduduk sebanyak 63.654 jiwa, yang terdiri dari 33.299 jiwa laki-laki dan 30.355 jiwa perempuan.

Sedangkan jumlah penduduk di akhir tahun 2015 mencapai angka 68.692 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 35.876 jiwa dan perempuan32.816 jiwa. Semakin besar jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semakin besar pula potensi masalah yang akan muncul. Oleh sebab itu, upaya penurunan jumlah penduduk disertai kualitas penduduk merupakan program pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Semenjak tahun 2010 hingga 2015, secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Bolaang Mongondow Timur dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Bolaang Mongondow Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2010	63.654	1,56
2011	64.373	-
2012	65.511	-
2013	66.677	-
2014	67.824	-
2015	68.692	-

Sumber : Proyeksi Penduduk

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Bolaang Mongondow Timur perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Kecamatan Kotabunan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil diantara kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Laju pertumbuhan Kecamatan Kotabunan adalah 0,50 persen kurang dari separuh angka kabupaten. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Modayag, sebesar 1,99 persen. Sementara Kecamatan Tutuyan yang merupakan ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, di Sulawesi Utara *sex ratio* dicatat sebesar 109,32. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 109-110 penduduk laki-laki. Dapat juga dikatakan bahwa penduduk

http://kotamobagukota.bps.go.id

laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kecamatan dengan *sex ratio* tertinggi adalah Nuangan, yaitu 110,81. Jika kita melihat kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semua *sex ratio* di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki di setiap kecamatan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kehidupan sosial masyarakat adalah tingkat kepadatan penduduk. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dibandingkan dengan luas wilayah yang dihuninya, dengan kata lain kepadatan penduduk berarti banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah untuk setiap kilometer persegi.

Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, serta tidak memadainya akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta masalah sosial lainnya.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Gambar 1.1. Komposisi Luas Kecamatan di Bolaang Mongondow Timur, 2015

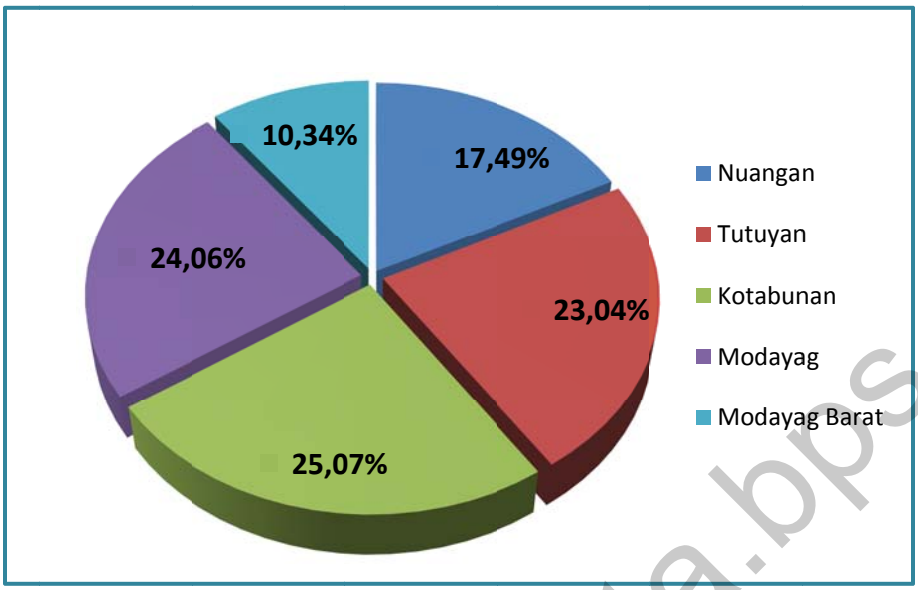

Persebaran penduduk antara kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di kecamatan yang letaknya lebih dekat dengan perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk.

Kabupaten Bolaang Mongndow Timur memiliki kepadatan 75,47. Artinya terdapat 75 sampai 76 jiwa di setiap Km^2. Kecamatan Modayag Barat merupakan yang terpadat penduduknya, dimana setiap Km^2 dihuni 111 jiwa. Terpadat kedua adalah Kecamatan Modayag , yaitu setiap Km^2 dihuni sekitar 94 jiwa. Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kotabunan, dimana di kecamatan tersebut setiap Km^2 wilayahnya dihuni sekitar 50 orang.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Bolaang Mongondow Timur Menurut Kecamatan, 2015

Kode	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	Nuangan	159,152	13 918	87,45
020	Tutuyan	209,734	12 179	58,07
030	Kotabunan	228,141	11 545	50,60
040	Modayag	219,019	20 600	94,06
050	Modayag Barat	94,123	10 450	111,02
Bolaang Mongondow Timur		**910,176**	**68 692**	**75,47**

Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka 2016

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Gambar 1.2 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun), kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Bolaang Mongondow Timur memiliki penduduk usia muda sekitar 27,39 persen, penduduk usia produktif 67,80 persen, dan penduduk

http://kotamobagukota.bps.go.id

usia lanjut 4,81 persen. Selama periode 2010 -2015 komposisi penduduk menurut tiga kelompok umur di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur cenderung tidak fluktuasi, meskipun tidak terlalu signifikan. Persentase penduduk usia produktif pada tahun 2011 sempat menurun dari 66,14 persen menjadi 65,96 persen, tetapi 4 tahun terakhir terus meningkat. Persentase usia lanjut, serupa dengan pola perkembangan persentase usia produktif 4 tahun terakhir terus meningkat meskipun pada tahun 2011 sempat menurun dari 4,44 persen menjadi 4,02 persen. Sedangkan persentase usia muda, menunjukkan fenomena sebaliknya, pada 4 tahun terakhir terus meningkat.

Gambar 1.2 Komposisi Penduduk Bolaang Mongondow Timur (persen), 2010-2015

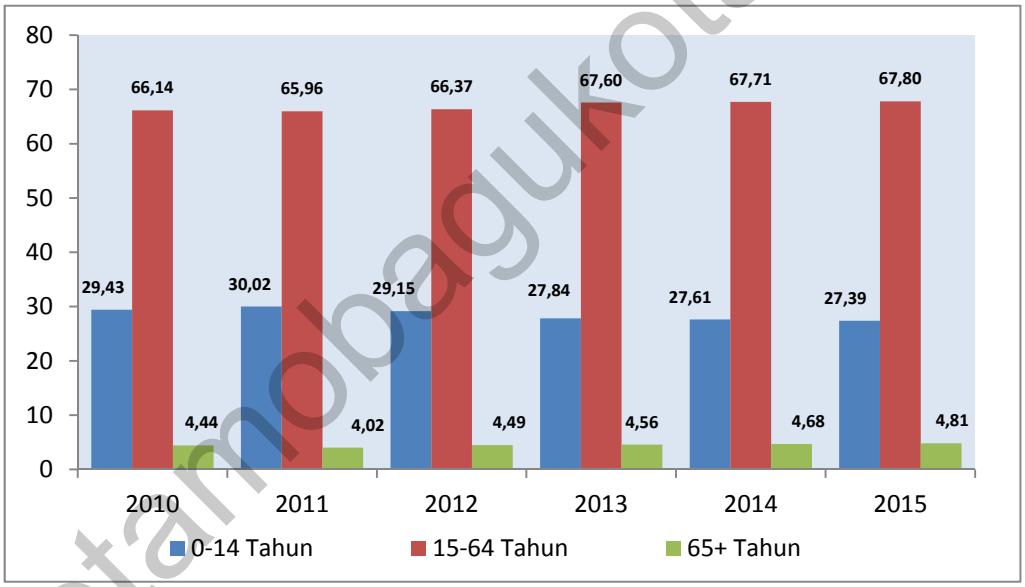

Sumber : Proyeksi Penduduk

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari angka beban ketergantungan yang semakin mengecil. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan sebesar 47,48, berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung

http://kotamobagukota.bps.go.id

sekitar 47 sampai 48 penduduk usia tidak produktif, menurun jika dibandingkan tahun 2014. Hal ini dapat menjadi sinyal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*.

Gambar 1.3. Angka Beban Ketergantungan, 2010-2015

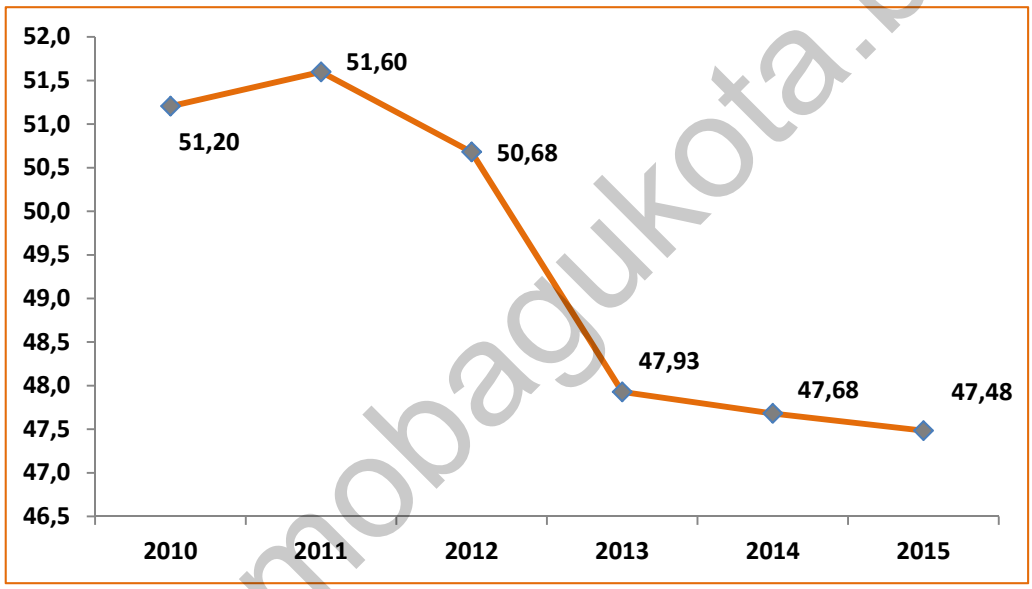

Sumber : Proyeksi Penduduk

Tren angka beban ketergantungan 2010-2015 Bolaang Mongondow Timur terlihat ke arah penurunan dari 51,20 di tahun 2010 menjadi 47,48 di tahun 2015,meskipun sempat meningkat dari tahun 2010 ke 2011 yaitu 51,20 persen menjadi 51,60 persen. Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya

http://kotamobagukota.bps.go.id

peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, dalam suatu rumahtangga terdapat 2 anggota rumahtangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumahtangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

Gambar 1.4. Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015

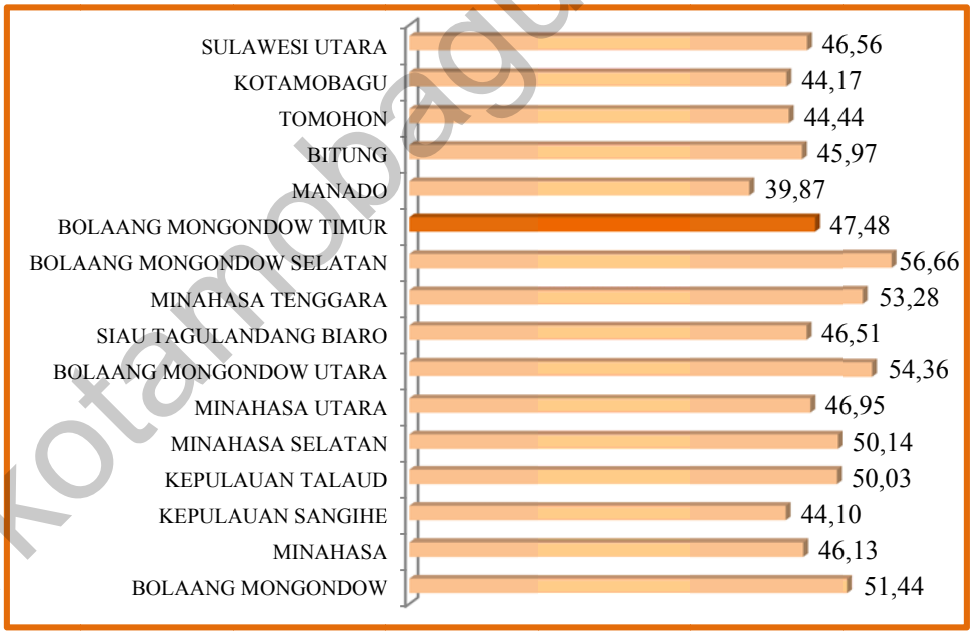

Bila diamati berdasarkan kabupaten/kota, tampak 6 kabupaten yang angka beban ketergantungannya berada di atas 50. Kabupaten tersebut adalah

http://kotamobagukota.bps.go.id

Bolaang Mongondow (51,44), Kepulauan Talaud (50,03), Minahasa Selatan (50,14), Bolaang Mongondow Utara (54,36), Minahasa Tenggara (53,28), dan Bolaang Mongondow Selatan (56,66). Angka beban ketergantungan tertinggi di Sulawesi Utara berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan yang terendah adalah Kota Manado, yaitu 39,87. Sementara untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki angka ketergantungan dibawah 50 yaitu sebesar 47,48.

1.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas menunjukkan terdapat sekitar 50,66 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang menikah pada usia di bawah 21 tahun di Sulawesi Utara tahun 2015. Perkawinan di bawah 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia

http://kotamobagukota.bps.go.id

kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

Gambar 1.5. Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015

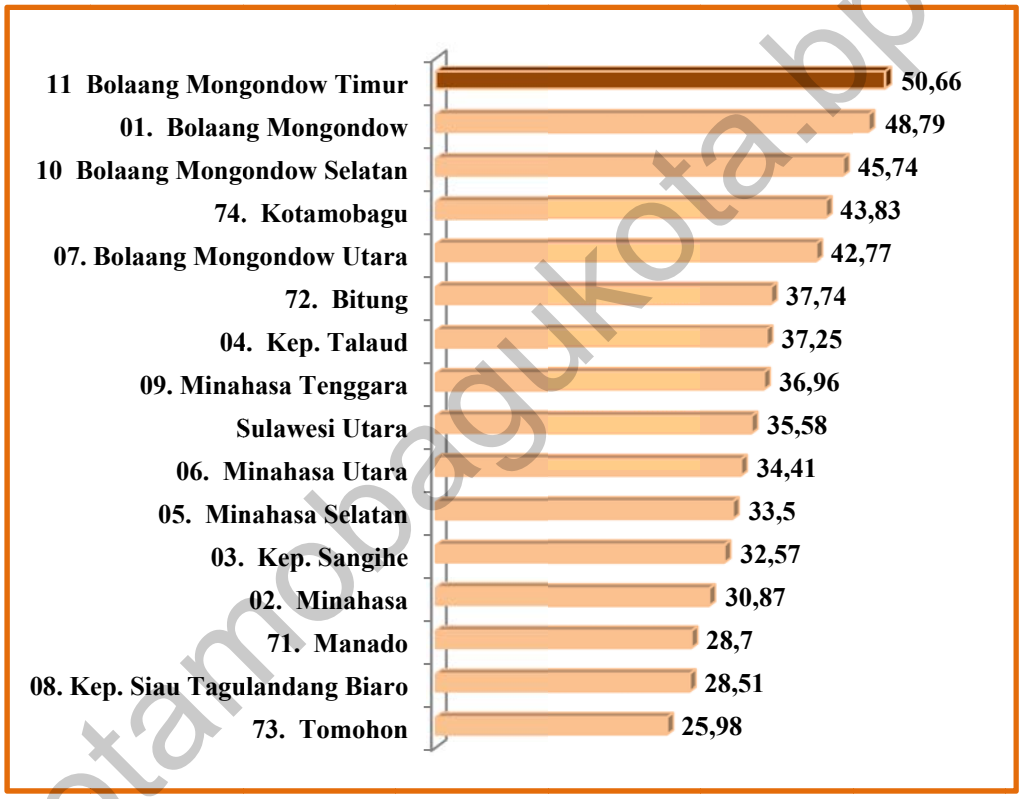

Pada tahun 2015, 50,66 persen wanita berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengaku menikah sebelum mencapai usia 21 tahun. Angka itu menunjukkan persentase paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Utara.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Jika dilihat lebih detail ke kelompok umur kurang dari 21 tahun, masih ada sekitar 6 persen wanita di Sulawesi Utara yang menikah atau kawin pada umur 16 tahun ke bawah. Sementara itu, terdapat 10 diantara 100 wanita di Bolaang Mongondow menikah di usia 16 tahun atau sebelumnya. Dibanding kabupaten/kota lainnya, jumlah ini merupakan yang terbanyak. Cukup kontras bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Tomohon, hanya 2 diantara 100 wanita saja yang menikah di rentang usia tersebut.

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang berbagai jenis macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang menangani program KB ini. BKKBN mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2015 hampir mencapai 77,25 persen. Sementara untuk yang tidak pernah menggunakan sebesar 16,42 persen dan yang penah memakai KB sebesar 6,34 persen.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi 2, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

http://kotamobagukota.bps.go.id

faktor kemanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2015

Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan	Persentase (%)
(1)	(2)
MOW / Tubektomi	0,82
MOP / Vasektomi	0,00
AKDR / IUD / Spiral	2,79
Suntikan	43,43
Susuk KB	16,19
Pil	35,50
Kondom	0,25
Intravag / Kondom Perempuan	0,00
Metode Menyusui Alami	0,00
Pantang Berkala	0,27
Lainnya	0,74
Jumlah	**100,00**

Sumber : Susenas

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik memotret bahwa di tahun 2015 suntikan dan pil merupakan dua alat kontrasepsi yang paling diminati oleh wanita umur 15-49 tahun yang pernah kawin. Pada tahun 2015, 43,43 persen dari mereka adalah pengguna alat KB suntik, sementara 35,50 persen adalah pemakai pil KB.

http://kotamobagukota.bps.go.id

http://kotamobagukota.bps.go.id

2. KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalahmorbiditas atau angka kesakitan penduduk dan rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menujukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

Pada tahun 2015, angka kesakitan (morbiditas) di Sulawesi Utara mencapai 17,5 persen. Hal ini berarti sekitar 17 hingga 18 dari 100 orang orang yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki angka kesakitan sebesar 23,25 persen lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun

http://kotamobagukota.bps.go.id

demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari angka kesakitan Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan wilayah dengan angka kesakitan tertinggi di Sulawesi Utara pada tahun 2015−yaitu hampir mencapai 27 persen. Sedangkan angka kesakitan terendah dimiliki oleh Kota Manado dan Kota Kotamobagu, yang masing-masing sebesar 12,47 persen.

Bila dilihat per kabupaten/kota, Kabupuaten Bolaang Mongondow Timur memiliki rata-rata lama sakit 6,05 hari, atau berkisar antara 6 sampai 7 hari. Angka tersebut merupakan angka yang hampir sama dengan angka provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan rata-rata lama sakit terpanjang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa memiliki yaitu sebesar 8,05 hari, atau berkisar antara 8 sampai 9 hari.

Gambar 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2015

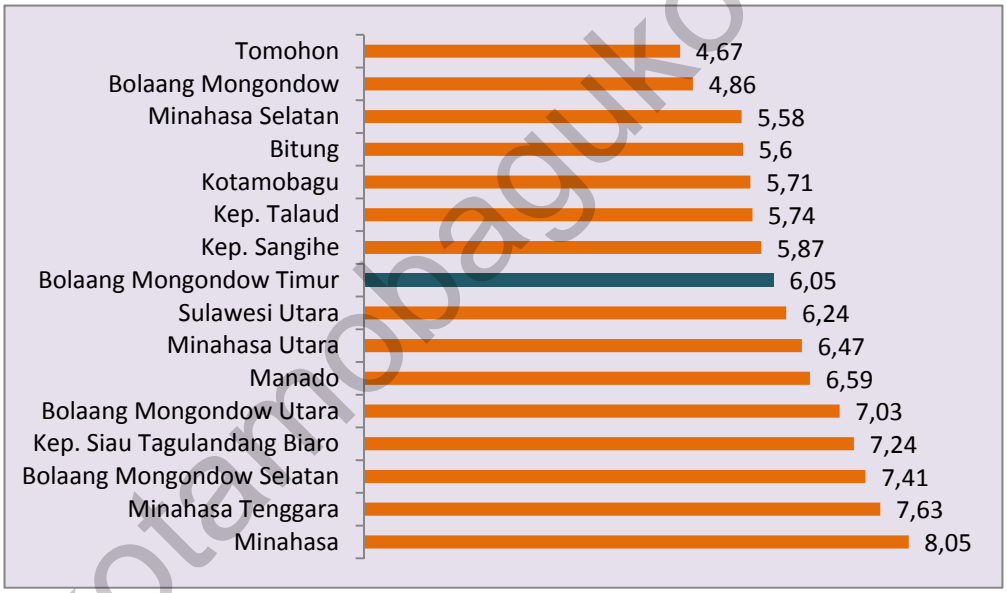

Sumber: Susenas 2015

2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Setelah sang anak

http://kotamobagukota.bps.go.id

lahir, Air Susu Ibu (ASI) dianjurkan supaya diberikan hingga anak berusia 2 tahun. ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Semakin lama bayi mendapatkan ASI, kekebalan/proteksi tubuh bayi akan lebih kuat. Pemerintah mencanangkan pemberian ASI eksklusif untuk anak hingga 6 bulan, setelah itu anak diberikan makanan pendamping ASI dan terus diberi ASI hingga usia 2 tahun. Di tahun 2015, ada sekitar 93 persen anak usia kurang dari 2 tahun di Bolaang Mongondow Timur yang masih diberi ASI oleh ibunya. Hal ini berarti ada sekitar 7 persen anak yang sudah putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, tampak bahwa persentase anak yang putus ASI paling tinggi berada di Kota Manado, sekitar 46 persen. Wilayah kedua tertinggi anak yang putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun adalah di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Gambar 2.2 Anak Usia kurang dari 2 Tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015

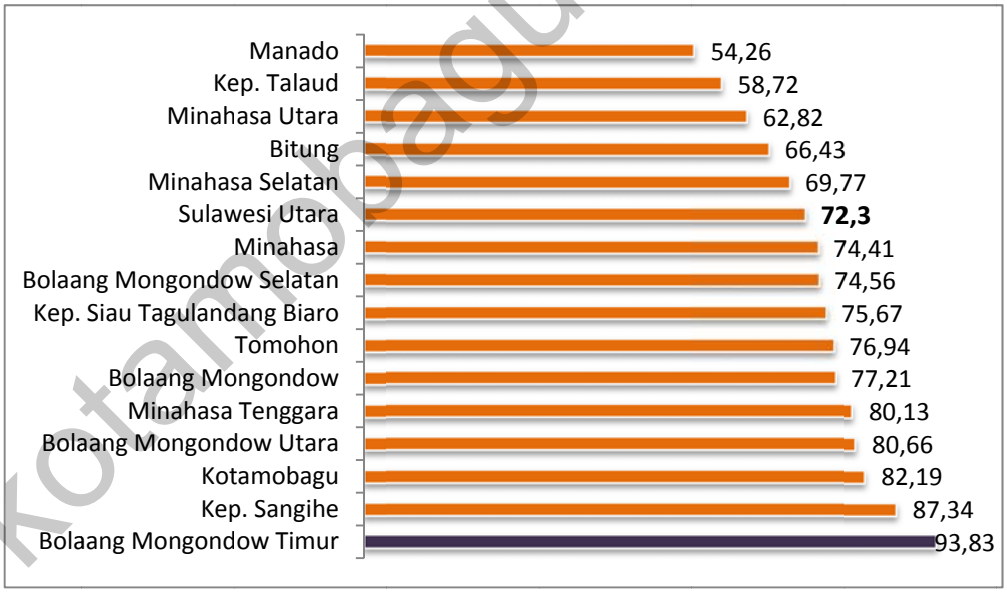

Sumber: Susenas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

Penyuluhan atau Sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar meningkatkan kesadaran ibu untuk memberikan ASI, sehingga menghasilkan generasi dengan daya tahan tubuh tinggi, yang tahan terhadap berbagai jenis penyakit. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang mengkonsumsi ASI hingga usia 2 tahun.

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi Utara rata-rata seorang anak disusui oleh ibunya sekitar 10 bulan. Pada tahun 2015 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur rata-rata lama pemberian ASI sekitar 9 sampai 10 bulan. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran ibu untuk memberikan ASI yang dianjurkan hingga anak berusia 2 tahun.

Gambar 2.3 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015

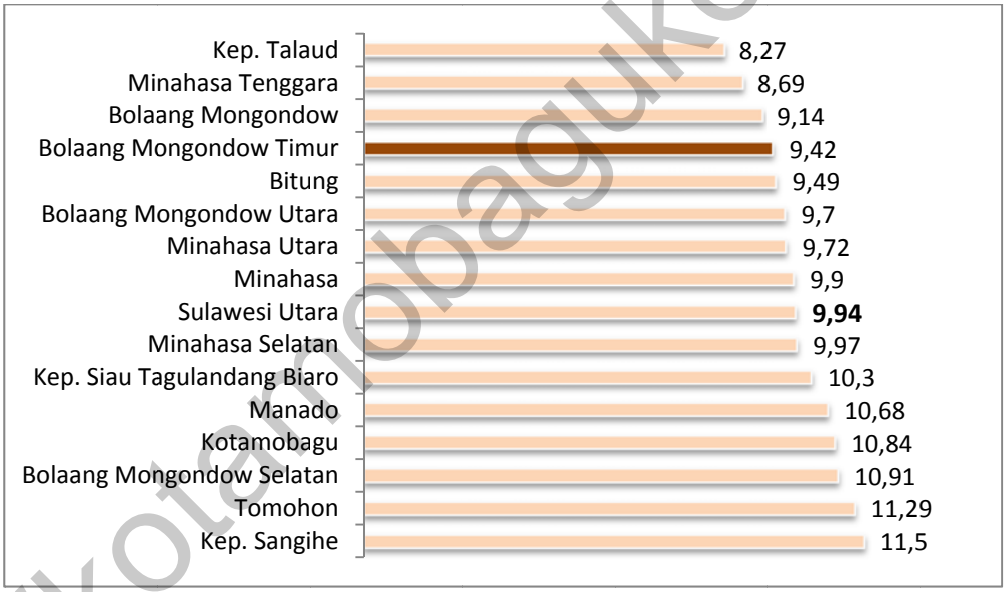

Sumber: Susenas 2015

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementrian kesehatan menganjurkan

http://kotamobagukota.bps.go.id

agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Gambar 2.4. Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015

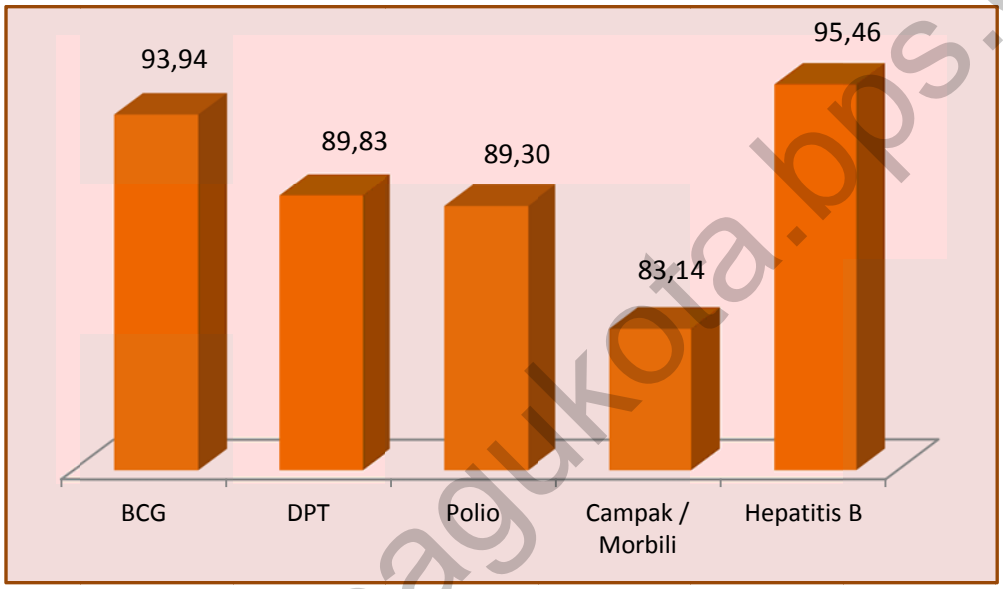

Sumber: Susenas

Balita yang pernah mendapatkan imunisasi DPT, Polio dan Campak di Bolaang Mongondow Timur masih tergolong relatif rendah, angkanya kurang dari 90 persen. Sementara balita yang mendapatkan imunisasi BCG dan Hepatitis B sudah lebih dari 90 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar

http://kotamobagukota.bps.go.id

persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Gambar 2.5. Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Bolaang Mongondow Timur (persen), 2015

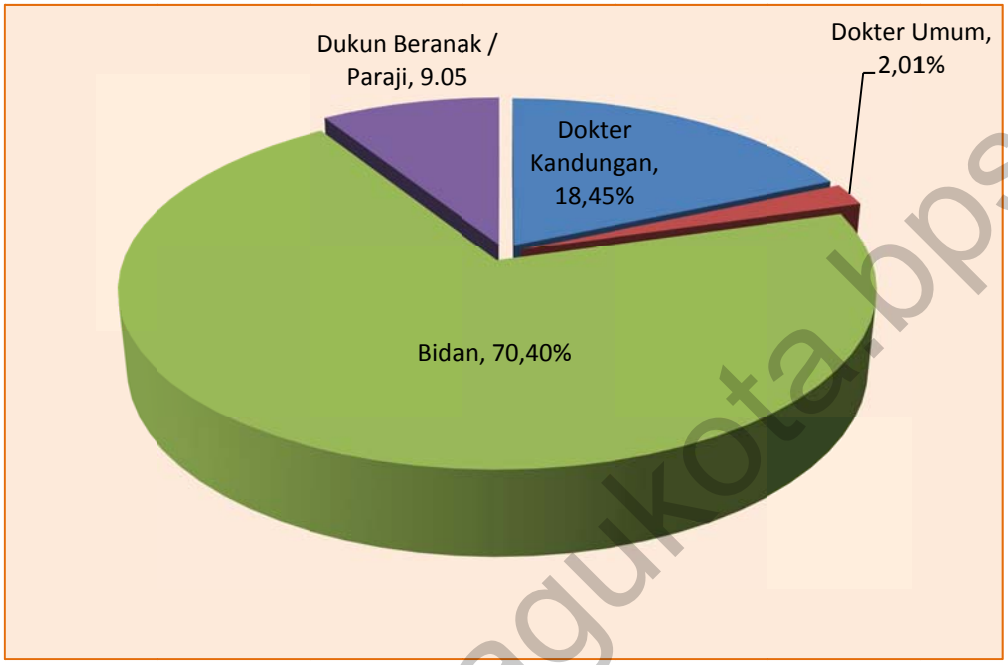

Sumber: Susenas

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Bolaang Mongondow Timur umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Sekitar 91 persen persalinan di tahun 2015 ditolong oleh tenaga kesehatan/medis, baik ditolong oleh dokter kandungan, dokter umum, maupun oleh bidan. Hanya 9 persen persalinan di tahun 2015 yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan/medis (dukun beranak/paraji).

Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan

http://kotamobagukota.bps.go.id

kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Dari beberapa pilihan tenaga medis, 70 persen masyarakat lebih memilih ditolong oleh bidan pada saat persalinan. Selain karena bidan merupakan tenaga yang dilatih khusus untuk menolong persalinan, bidan juga mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan pun bidan mudah dijangkau karena di setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan.

Di sisi lain, masih ada 9 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi. Ini disebabkan karena tenaga medis sangat sulit ditemukan, terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak mutlak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi.

Selain bidan, preferensi masyarakat Bolaang Mongondow Timur untuk memilih dokter dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 20 persen. Dimana dokter spesialis kandungan sebesar 18 persen dan dokter umum sebanyak 2 persen. Di Bolaang Mongondow Timur biasanya masyarakat yang melakukan persalinan menggunakan tenaga dokter lebih sering terjadi di wilayah yang dekat perkotaan dalam hal ini Kecamatan Modayag dan Modayag Barat.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang

http://kotamobagukota.bps.go.id

nyata antara penduduk di perdesaan dan penduduk di perkotaan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan tersebut, ditambah perilaku penduduk itu sendiri.

Tabel 2.1 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah (persen), 2015

Tempat Berobat Jalan	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
(1)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	13,51
Rumah Sakit Swasta	4,08
Praktek Dokter / Bidan	49,39
Klinik / Praktek Dokter Bersama	4,18
Puskesmas / Pustu	28,86
UKBM*	3,18
Praktek Pengobatan Tradisional	3,99
Lainnya	1,21

Sumber: Susenas

*) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

http://kotamobagukota.bps.go.id

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2015 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter / Bidan sebesar 49 persen dan puskesmas/pustu 28 persen. Sementara rumah sakit swasta dan klinik sangat sedikit untuk penduduk Bolaang Mongondow Timur melakukan berobat jalan, hal ini disebabkan karena belum tersedianya rumah sakit dan masih sedikitnya jumlah klinik. Sehingga penduduk Bolaang Mongondow Timur mencari tempat untuk berobat jalan di lokasi yang terdekat dan memiliki akses jalan yang mudah.

http://kotamobagukota.bps.go.id

http://kotamobagukota.bps.go.id

3. PENDIDIKAN

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dalam era globalisasi sekarang ini menjadi sebuah tuntutan serius yang harus dipenuhi. Ini berkaitan dengan semakin teukanya persiapan di setiap bidang kehidupan, tidak hanya menyangkut bidang yang berkaitan dengan bisnis, namun juga penyediaan sumber daya manusianya.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap

http://kotamobagukota.bps.go.id

warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan dalam bab ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 yang dilakukan oleh BPS.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya di Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015 sudah mencapai 99,54 persen, sisanya sebanyak 0,39 persen adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) Bolaang Mongondow Timur sudah sangat tinggi. Tidak hanya Bolaang Mongondow Timur, semua kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi Utara sudah mencapai AMH yang cukup tinggi, bahkan ada kabupaten yang mencapai angka 100 persen. Dengan sudah tingginya AMH di sebagian besar wilayah Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, AMH tidak lagi menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lagi. AMH diganti dengan indikator *Expected Years of Schooling (EYS)* atau Harapan Lama Sekolah (HLS).

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	99,28	98,19	98,75
Minahasa	99,71	100,00	99,85
Kep. Sangihe	98,34	98,73	98,54
Kep. Talaud	99,90	99,42	99,66
Minahasa Selatan	99,91	99,72	99,82
Minahasa Utara	99,71	100,00	99,85
Bolaang Mongondow Utara	99,60	99,24	99,43
Kep. Siau Tagulandang Biaro	99,36	99,37	99,37
Minahasa Tenggara	100,00	100,00	100,00
Bolaang Mongondow Selatan	99,83	99,85	99,84
Bolaang Mongondow Timur	99,60	99,48	99,54
Manado	100,00	99,81	99,91
Bitung	99,86	99,52	99,69
Tomohon	100,00	99,83	99,92
Kotamobagu	99,66	99,68	99,67
Sulawesi Utara	**99,69**	**99,56**	**99,63**

Sumber: Susenas 2015

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk

http://kotamobagukota.bps.go.id

penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.1. Harapan Lama Sekolah, 2010-2015

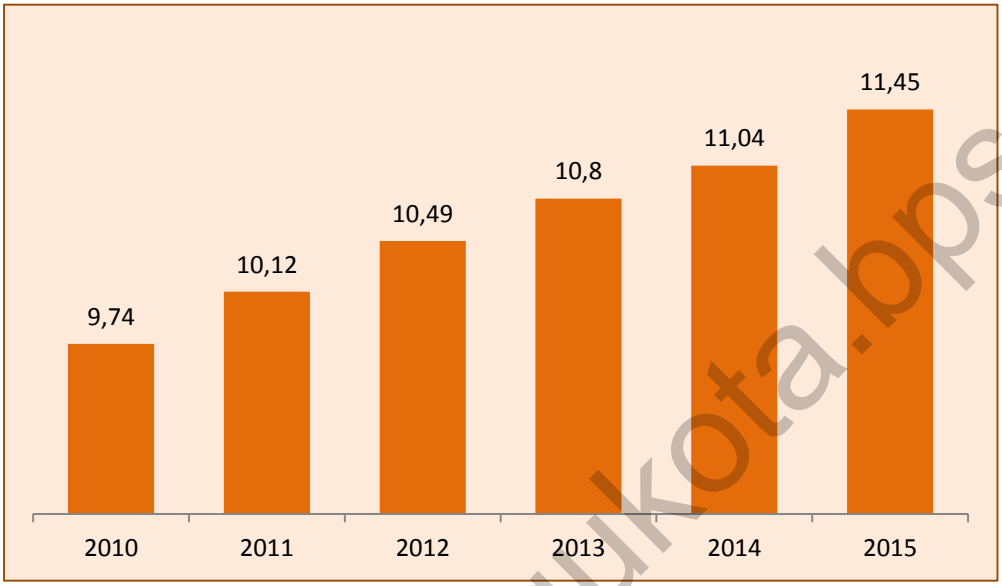

Sumber : Susenas 2015

Dari tahun 2010 hingga 2015 angka HLS terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,28 persen. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata tiap orang di Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015 diharapkan akan melalui pendidikannya selama 11 sampai 12 tahun. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya

http://kotamobagukota.bps.go.id

penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat adalah, indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan ada artinya.

3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari peduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 adalah 7,38 tahun. berarti penduduk bolaang mongondow timur rata-rata bersekolah hingga kelas 1 SMP. Di tahun 2015 ini RLS Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 0,10 poin. Meskipun mengalami kenaikan tetapi angka rata-rata lama sekolah Bolaang Mongondow Timur masih di bawah Sulawesi Utara yang memiliki angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,88.

Kota Manado merupakan wilayah di Sulawesi Utara yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Manado sebesar 11,02 tahun, berarti penduduk manado rata-rata bersekolah hingga kelas 2 SMA. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bolaang

http://kotamobagukota.bps.go.id

Mongondow, yaitu sebesar 7,14 tahun. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara tentu kondisi masyarakatnya lebih heterogen dibandingkan daerah lain. Dengan berbagai macam daya tarik yang ada di Manado, mengundang penduduk dari wilayah lain untuk bertempat tinggal di kota ini. Masyarakat pendatang ini juga sangat mempengaruhi rata-rata lama sekolah di suatu daerah. Jika masyarakat pendatang banyak yang menamatkan pendidikan tinggi, tentunya rata-rata lama sekolah akan terdongkrak naik. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat pendatang banyak yang berpendidikan rendah, tentunya akan menekan rata-rata lama sekolah suatu wilayah.

Tabel 3.2 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2015

Kabupaten/Kota	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	7,13	7,14
Minahasa	9,53	9,54
Kep. Sangihe	7,34	7,50
Kep. Talaud	8,73	8,82
Minahasa Selatan	8,47	8,70
Minahasa Utara	9,07	9,23
Bolaang Mongondow Utara	7,51	7,52
Kep. Siau Tagulandang Biaro	8,18	8,34
Minahasa Tenggara	8,37	8,38
Bolaang Mongondow Selatan	7,68	7,70
Bolaang Mongondow Timur	7,28	7,38
Manado	11,01	11,02
Bitung	9,26	9,28
Tomohon	10,20	10,22
Kotamobagu	9,75	9,75
Sulawesi Utara	**8,86**	**8,88**

Sumber: Susenas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 3.3 Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai ijazah	25,99	26,46	26,21
SD / MI / Paket A	26,41	33,98	29,98
SMP / MTs / Paket B	24,12	18,38	21,42
SMA / SMK / MA / Paket C	16,76	15,14	16,00
Diploma I s.d. III	2,96	3,11	3,03
Diploma IV / S1	0,34	0,23	0,29
S2 / S3	0,48	0,86	0,65
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 3.3. memperlihatkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Tahun 2015 persentase penduduk laki-laki yang tidak punya ijazah sebesar 25,99 persen, lebih rendah dari perempuan yaitu 26,46 persen. Kemudian persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD sebesar 26,41 persen, SMP dan SMA masing-masing 24,12 persen dan 16,76 persen sedangkan persentase perempuan yang memiliki ijazah SD, SMP dan SMA masing-masing 33,98; 18,38; 15,14 persen.

Dalam hal pendidikan terlihat bahwa telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Tidak ada perbedaan nyata antara persentase perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu dengan persentase laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Tipisnya perbedaan menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Utara. Budaya masa lalu dimana perempuan tidak perlu sekolah karena dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja sejak lama tidak tergambar di masyarakat Sulawesi Utara. Jika ada perbedaan dalam hal persentase, dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh kemauan pribadi.

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Program Wajib Belajar 9 tahun di Bolaang Mongondow Timur hampir mendekati berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun yang sebesar 99,46 persen. Dengan kata lain hanya 0,54 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. Penyumbang angka putus sekolah usia

http://kotamobagukota.bps.go.id

13-15 tahun terdapat pada anak laki-laki. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menujukkan angka yang baik, yaitu 98,31 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 70,24 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	97,74	98,90	98,31
13 – 15	98,82	100	99,46
16 – 18	70,32	70,13	70,24

Sumber: Susenas 2015

Isu *gender* pada indikator APS Bolaang Mongondow Timur cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurusi urusan rumahtangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan *rate of return* investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Bolaang Mongondow Timur yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada jenjang umur 7-12, dan 13-15tahun. Perlu ada

http://kotamobagukota.bps.go.id

penelitian lebih lanjut mengenai penyebab pasti kondisi tersebut terjadi di Bolaang Mongondow Timur

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, 2015

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	105,22	117,98	111,47
SMP/SLTP	113,53	72,52	91,36
SMA/SLTA	74,40	107,92	87,31

. Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, 2015

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	90,88	98,90	94,81
SMP/SLTP	79,12	72,52	75,55
SMA/SLTA	58,97	70,13	63,27

Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2015 APM SD/Sederajat di Sulawesi Utara sebesar 94,81 persen, artinya

http://kotamobagukota.bps.go.id

tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SD/sederajat. Sementara untuk APM SMP/SLTP dan SMA/SLTA masing-masing sebesar 75,55 dan 63,27 persen.

http://kotamobagukota.bps.go.id

http://kotamobagukota.bps.go.id

4. KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jam kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur

http://kotamobagukota.bps.go.id

pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 - 2015

Indikator	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK	55,95	59,11	67,64
TPT	3,75	6,40	7,19

Sumber: Sakernas

TPT Bolaang Mongondow Timur mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan angka 3,75 persen pada tahun 2013 menjadi 7,19 persen pada tahun 2015. Sejalan dengan TPT, TPAK juga mengalami kenaikan, dari 55,95 persen di tahun 2013 menjadi 67,64 persen di tahun 2015. Penambahan angkatan kerja yang dibarengi dengan bertambahnya pengangguran mengindikasikan kurangnya lapangan kerja di Bolaang Mongondow Timur yang dapat menarik para pengangguran masuk ke dalamnya.

http://kotamobagukota.bps.go.id

4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijasah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015

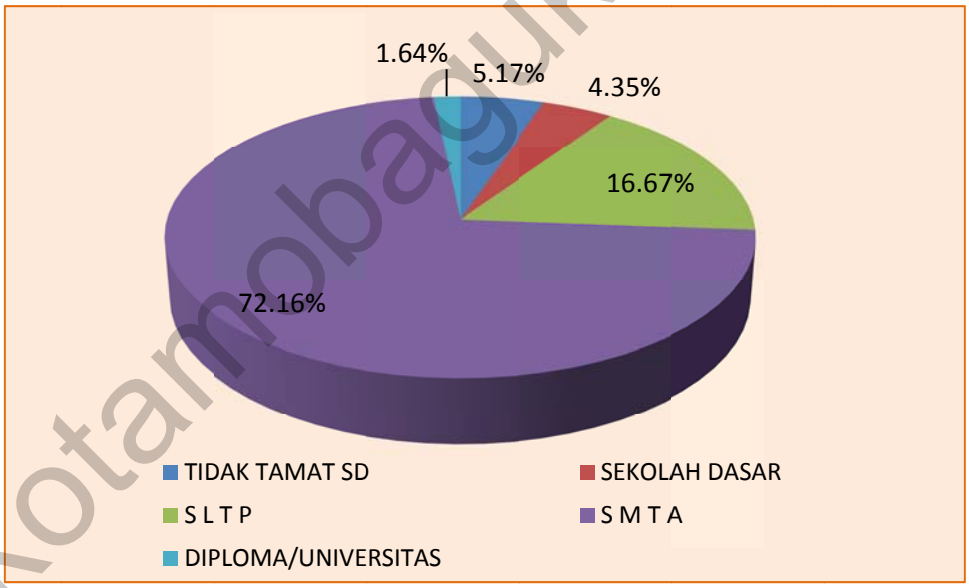

Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 kebanyakan penduduk Bolaang Mongondow Timur penganggur adalah yang berpendidikan SMA, yaitu sekitar 72 persen. Penganggur yang tidak tamat SD lebih kecil dibandingkan dengan

http://kotamobagukota.bps.go.id

penganggur yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kurang dari 2 persen penganggur tidak menamatkan SD, sedangkan penganggur yang sudah menamatkan perguruan tinggi hampir mencapai 17 persen. Penganggur yang sudah tamat perguruan tinggi inilah yang kemudian disebut dengan penganggur intelektual. Penganggur intelektual ini menempati urutan ke 2 terbanyak setelah penganggur yang tamat SMA.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada bahasan ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015

Lapangan Usaha	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	36.26	54.19	51.78
Industri	17.34	15.44	15.70
Jasa	46.40	30.37	32.53
JUMLAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha favorit di Bolaang Mongondow Timur. Sebanyak 51,78 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Untuk sektor jasa menempati urutan kedua yang di minati penduduk Bolaang Mongondow Timur sebesar 32,53 persen, sementara hanya 15,70 persen penduduk yang minat di sektor industri.

Gambar 4.2. Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015

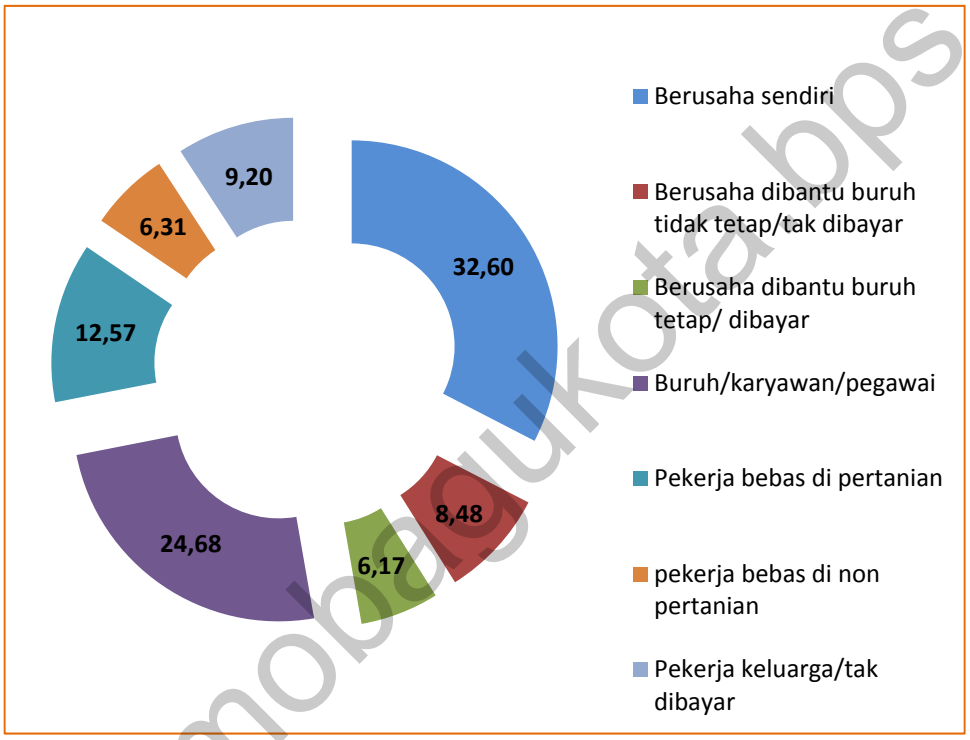

Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 penduduk bekerja sebagai buruh sendiri sebesar 32,60 persen. Status pekerjaan terbanyak kedua adalah buruh/karyawan/pegawai (24,68 persen). Selain itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas di pertanian juga cukup banyak (12,57 persen) dan Pekerja bebas di no pertanian sebanyak 6,31 persen. Untuk penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebanyak 8,48 persen, sedangkan yang berusaha dibantu buruh tetap/ dibaya (6,17 persen).

http://kotamobagukota.bps.go.id

4.4. Jumlah jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan dibawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Tabel 4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja, 2015

Jam kerja (jam)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 34	4,594	2,713	7,307
35 + *)	17,588	6,520	24,108
JUMLAH	**22,182**	**9,233**	**31,415**

Sumber: Sakernas
Catatan : *) termasuk sementara tidak bekerja

Hasil sakernas menunjukan bahwa jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam pada tahun 2015 sebanyak 7,307 ribu pekerja, yang terdiri dari 4.594 pekerja laki-laki dan 2.713 pekerja perempuan. Sementara pekerja yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu ada sebanyak 24.108.

http://kotamobagukota.bps.go.id

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat

http://kotamobagukota.bps.go.id

kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 791.494 menjadi Rp 820.426 selama periode 2014-2015. Bila dilihat persentasenya, persentase pengeluaran untuk makanan juga meningkat dari 50,44 persen menjadi 51,96 persen. Begitu juga sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non makanan mengalami penurunan dari 49,56 persen menjadi 48,04 persen. Hal ini merupakan indikasi dini adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak signifikan mengalami penurunan. Penurunan persentase pada kelompok bukan makanan hampir merata di semua sub kelompok non makanan kecuali pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta. Persentase pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta mengalami kenaikan.

Tabel 5.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015

Jenis Pengeluaran	Persentase (%)	
	2014	2015
(1)		(4)
Makanan	**57,24**	**52,44**
Non Makanan	**42,76**	**47,56**
Perumahan	17,74	22,95
Barang dan Jasa	11,3	6,47
Pakaian dan Alas Kaki	4,42	4,33
Barang Tahan Lama	1,92	6,68
Pajak dan Asuransi	0,98	0,77
Keperluan Pesta	1,06	2,57

Sumber: Susenas

http://kotamobagukota.bps.go.id

Dengan asumsi bahwa penduduk yang persentase pengeluaran non makanannya lebih besar dari pengeluaran makanan merupakan penduduk yang sejahtera, maka kita dapat mengatakan penduduk Bolaang Mongondow Timur yang sejahtera adalah penduduk yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Artinya jika dalam 1 rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, maka penghasilan rumah tangga tersebut minimal Rp 4.000.000 per bulan.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau *gini ratio.*

Indeks gini Sulawesi Utara Maret 2015 sebesar 0,37, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Utara masih dalam tingkat yang sedang. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki ketimpangan kategori sedang. Di Sulawesi Utara hanya Kabupaten Talaud yang memiliki indeks gini yang bernilai kurang dari 0,30. Pendapatan antar penduduk di Kabupaten Talaud memiliki ketimpangan yang rendah atau relatif homogen. Sementara Indeks gini

http://kotamobagukota.bps.go.id

tertinggi berada di Kota Manado, yaitu sebesar 0,39. Penduduk yang lebih heterogen diduga menyebabkan indeks gini di Kota Manado menjadi yang paling tinggi di Sulawesi Utara. Tetapi, indeks gini di Kota Manado masih dalam kategori ketimpangan sedang.

Gambar 5.1. *Gini Ratio* menurut Kabupaten/Kota, 2015

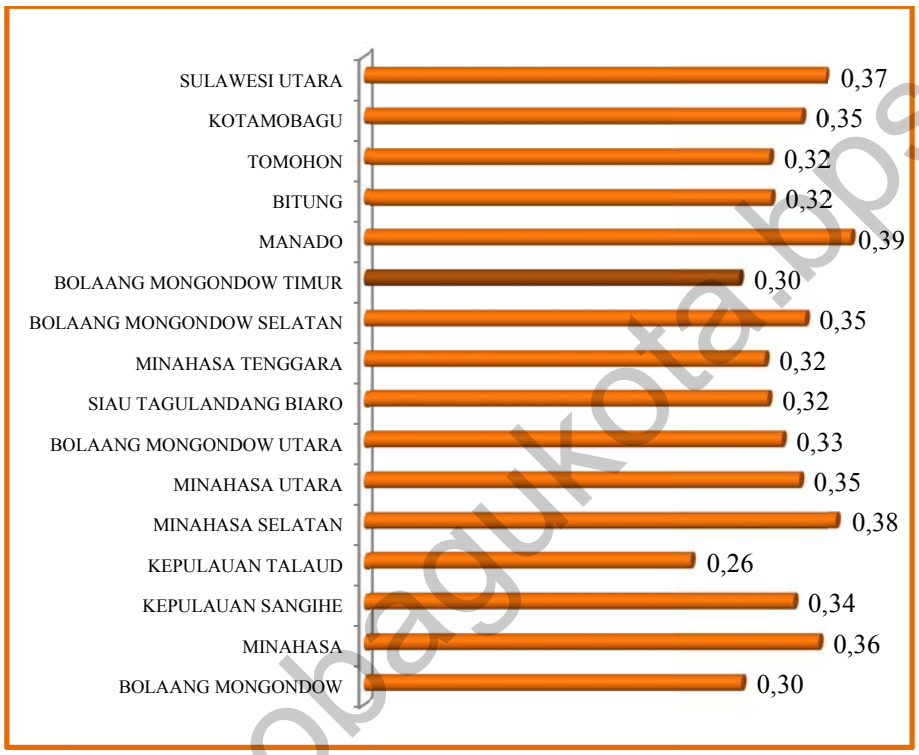

Sumber: Susenas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi

http://kotamobagukota.bps.go.id

kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 6.1 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Bolaang Mongondow Timur tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2015

Indikator	Persentase
(1)	(3)
Lantai Tanah (persen)	2,98
Atap Layak * (persen)	97,15
Dinding Permanen (persen)	98,30
luas lantai perkapita ≥ 10 (m^2)	69,47

Sumber : Susenas
Catatan : * Tidak beratap dedaunan

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai perkapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. MDGs menetapkan standar luas lantai perkapita

http://kotamobagukota.bps.go.id

menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 7,2 m^2 masuk dalam salah satu kriteria rumah kumuh. Kriteria rumah kumuh tidak hanya dilihat dari luas lantai perkapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 7,2 m^2 masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar MDGs tersebut, masih terdapat sekitar 16,20 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang 7,2 m^2 di Bolaang Monondow Timur pada tahun 2015. Tabel 6.1 juga memberi gambaran bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Timur umumnya menempati luas lantai perkapita yang sudah layak, jauh di atas standar kumuh.

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacingan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2015, sekitar 2,98 persen rumahtangga di Bolaang Mongondow Timur yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Bolaang Mongondow Timur tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir 97 persen rumahtangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 98 persen rumahtangga rumahnya berdinding permanen.

http://kotamobagukota.bps.go.id

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam bahasan ini, cakupan air bersih yang dimaksud adalah air kemasan, air isi ulang, air ledeng, air pompa, air sumur terlindung dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10m dari pembuangan akhir tinja.

Pada tahun 2015, hampir 57 persen rumahtangga di Bolaang Mongondow Timur dapat mengakses air minum bersih. Sementara sekitar 53 persen rumah tangga yang masih sulit mengakses air minum bersih. dan hampir 3 persen rumah tangga di bolaang mongondow timur masih menggunakan air hujan untuk konsumsi air minum.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Bolaang Mongondow Timur, pada tahun 2015 terdapat sekitar 38 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 6.2. Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015

Indikator	Persentase
(1)	(4)
Air kemasan, air isi ulang, & ledeng	25,35
Air minum bersih *	56,66
Jamban sendiri	60,21
Jamban sendiri dengan tangki septik	
Sumber penerangan listrik	99,25

Sumber : Susenas 2015

Catatan : * Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 m

Di Bolaang Mongondow Timur masih banyak rumah tangga yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar (26,32 persen), biasanya rumah tangga ini memanfaatkan sungai sebagai fasilitas untuk membuang air besar. Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil susenas 2015, sembilan puluh sembilan persen rumah tangga di Bolaang Mongondow Timur sudah menikmati fasilitas listrik.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan

http://kotamobagukota.bps.go.id

lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 6.1. Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota (persen), 2015

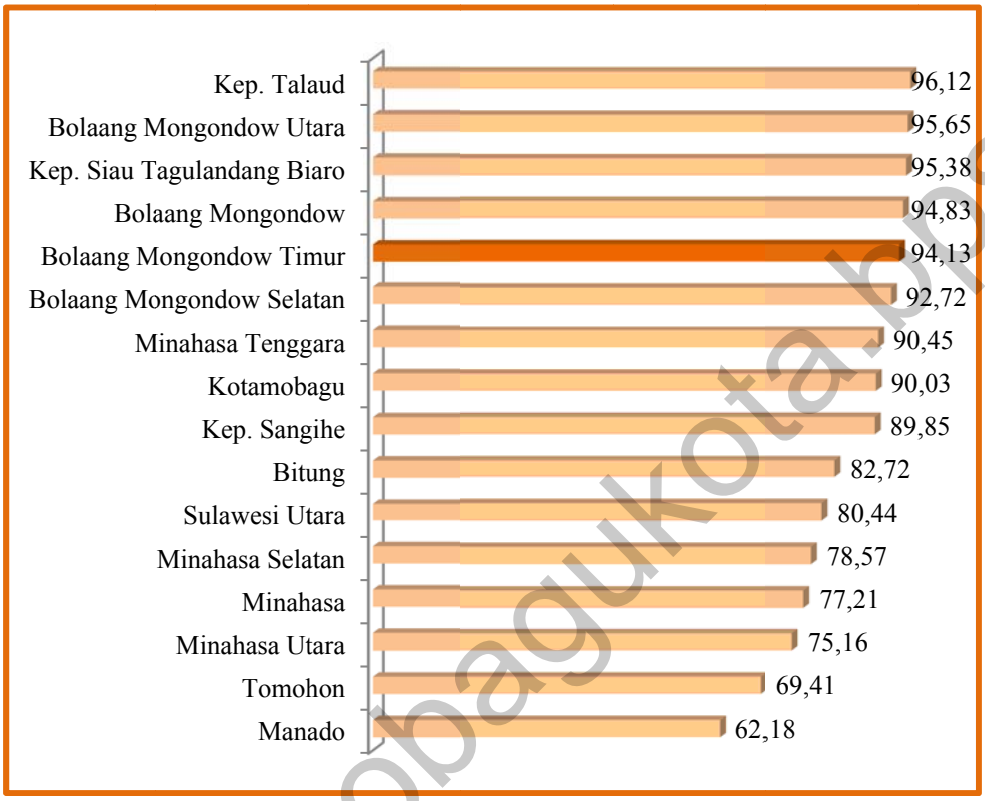

Sumber: Susenas 2015

Sekitar 94 persen rumah tangga di Bolaang Mongondow Timur menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bebas sewa, dan lainnya. Dari gambar terlihat bahwa rumah tangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya (62,2 persen). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya. Kurang dari 13 persen penduduk di Kota Manado menempati rumah kontrak/sewa, sedangkan di Kepl. Talaud,

http://kotamobagukota.bps.go.id

Bolaang Mongondow Utara, dan Kepl. Siau Tagulandang Biaro hampir semua penduduknya menempati rumah milik sendiri.

Penduduk perdesaan lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hanya sekitar 72 persen rumah tangga di wilayah perkotaan yang menempati rumah milik sendiri, sementara lebih dari 87 persen penduduk di pedesaan menempati rumah milik sendiri. Rumah kontrakan atau kos lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kemungkinan lain adalah mengenai lahan di daerah perkotaan sedikit untuk membangun rumah. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Sehingga penduduk yang belum memiliki rumah lebih memutuskan untuk menempati rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa. Sementara untuk Sulawesi Utara rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 80 persen.

http://kotamobagukota.bps.go.id

http://kotamobagukota.bps.go.id

7. KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa perogram pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

http://kotamobagukota.bps.go.id

7.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segara melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Miskin, September 2011 – 2015

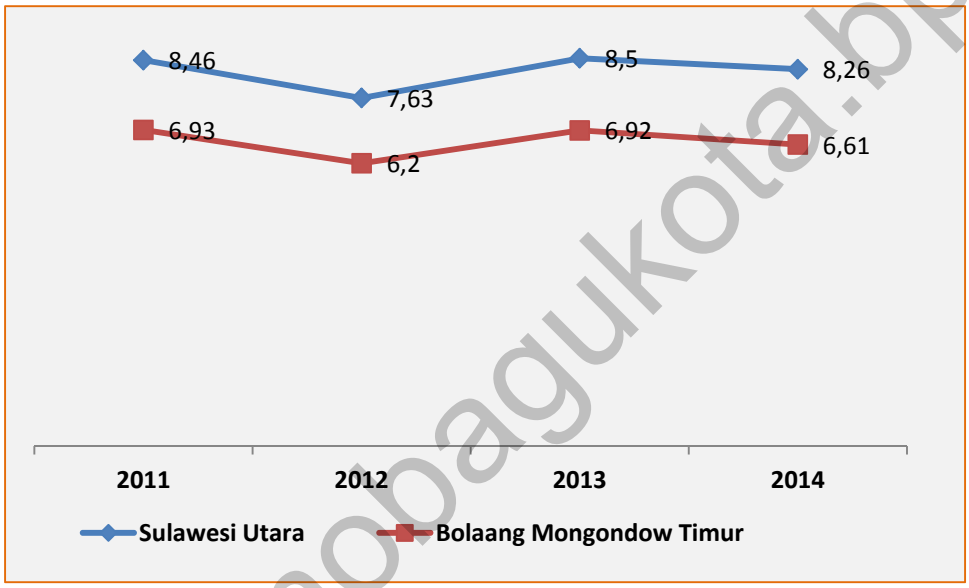

Sumber: Susenas 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Bolaang Mongondow Timur masih berada di bawah angka Provinsi. Artinya, Bolaang Mongondow Timur tidak menyumbang bertambahnya angka kemiskinan. Tentunya hal itu mengindikasikan keberhasilan pemerintah Bolaang Mongondow Timur selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Bolaang Mongondow Timur sebanyak 4.490 jiwa atau sekitar 6,61 persen.

http://kotamobagukota.bps.go.id

7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Membahas kemiskinan tidak hanya sekedar mengenai persentase penduduk miskin (P0). Tetapi ada variabel lain yang juga berkaitan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index)* dan Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index)*. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2). Penurunan pada P_1mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Tabel 7.1. Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Bolaang Mongondow Timur, September 2011 - 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,02	0,53	0,63	0,70
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	0,11	0,10	0,10
Garis Kemiskinan (Rp)	232.042	235.203	237.317	238.422

Sumber : Susenas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Selama periode September 2011-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami fluktuasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,02 di september 2011 menjadi 0,53 di september 2013, akan tetapi naik di tahun 2013 dan 2014 masing-masing menjadi 0,63 dan 0,70. Kenaikan tersebut mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Indeks Keparahan Kemiskinan juga hampir memiliki pola yang sama, sempat menurun cukup signifikan di tahun 2012 menjadi 0,11, kemudian meningkat sedikit di tahun tahun 2013 dan 2014 menjadi 0,10

http://kotamobagukota.bps.go.id

8. SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

http://kotamobagukota.bps.go.id

8.1. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin, tujuan utama bepergiannya adalah berlibur/rekreasi.

Tabel 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	1,93	1,90	1,91
Minahasa	2,39	2,18	2,29
Kepl. Sangihe	0,89	0,82	0,86
Kepl. Talaud	0,64	0,68	0,66
Minahasa Selatan	3,96	4,53	4,23
Minahasa Utara	2,92	3,08	3,00
Bolaang Mongondow Utara	0,19	0,20	0,19
Kepl. Sitaro	1,06	1,44	1,25
Minahasa Tenggara	2,91	3,20	3,05
Bolaang Mongondow Selatan	1,47	1,76	1,61
Bolaang Mongondow Timur	1,94	2,59	2,25
Kota Manado	1,32	1,89	1,60
Kota Bitung	3,19	3,54	3,36
Kota Tomohon	2,50	3,49	2,99
Kota Kotamobagu	2,30	2,35	2,32
Sulawesi Utara	**2,14**	**2,39**	**2,26**

Sumber : Susenas 2015

http://kotamobagukota.bps.go.id

Persentase penduduk Bolaang Mongondow Timur yang bepergian wisata pada tahun 2015 sebesar 2,25 persen . Jika dibandingkan antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa preferensi laki-laki dalam hal bepergian/berwisata tidak berbeda dengan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan di kisaran 1-2 persen saja yang suka bepergian maupun berwisata. Perbedaan yang cukup mencolok dibanding kabupaten/kota lainnya adalah antara laki-laki dan perempuan di Minahasa Selatan. Lebih banyak perempuan di Minahasa Selatan yang suka bepergian atau berwisata dibanding laki-laki. Empat hingga lima dari 100 $^{\text{perempuan}}$ di Minahasa suka bepergian/berwisata. Lain halnya dengan penduduk di Bolaang Mongondow Utara, mereka dikatakan kurang melakukan kegiatan bepergian wisata karena hanya 2 dari 1000 penduduk yang melakukan bepergian wisata.

8.2. Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan HP/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di daerah perkotaan, penduduk Sulawesi Utara lebih banyak yang menguasai/memiliki HP dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Enam puluh sembilan persen penduduk perkotaan menguasai/memiliki HP sementara di pedesaan hanya sekitar 51 persen. Jika dilihat dari sisi gender, hanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait kepemilikan HP.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Gambar 8.1. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP, Menggunakan Komputer dan Mengakses Internet (persen), 2015

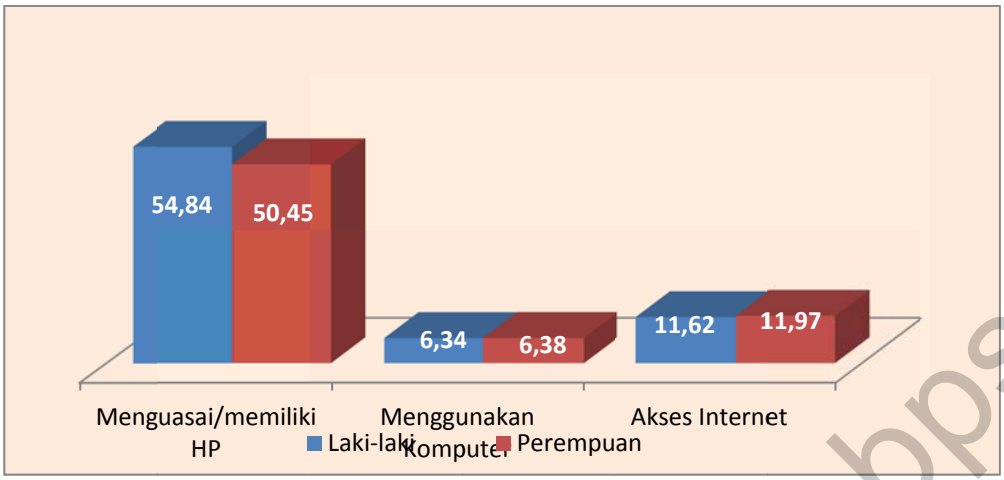

Sumber: Susenas 2015

Dilihat dari Gambar 8.1, di Bolaang Mongondow Timur yang menguasai/ memiliki HP sebanyak 54,84 persen laki-laki dan 50,45 persen penduduk perempuan. Hal ini terbalik dengan yang menggunakan komputer, dimana perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Selain kepemilikan HP, akses terhadap internet juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Susenas 2015 memberi gambaran bahwa 11 hingga 12 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas Bolaang Mongondow Timur mengakses internet.

8.3. Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

http://kotamobagukota.bps.go.id

Gambar 8.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015

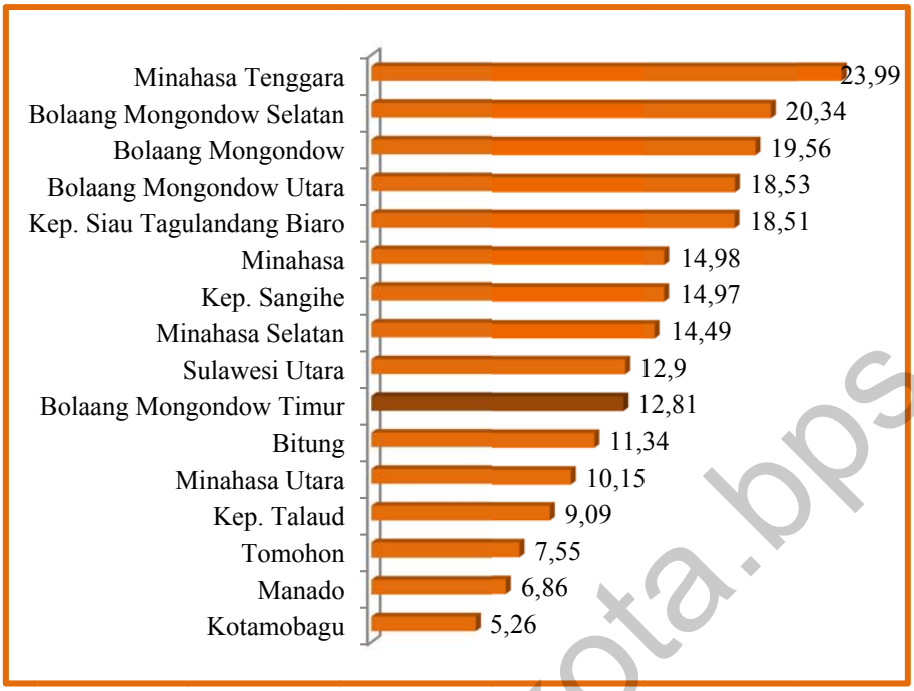

Sumber: Susenas 2015

Kredit Usaha yang dimaksud dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yangdiberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi). Hampir 30 persen rumah tangga penerima kredit usaha mendapatkan kredit usaha dari PNPM dan kurang dari 23 persen mendapatkan kredit usaha dari program bank selain KUR, sementara penerima KUR hampir 20 persen.

8.4. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase

http://kotamobagukota.bps.go.id

korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut data susenas 2015, ada sekitar 0,75 persen penduduk Bolaang Mongondow Timur yang menjadi korban kejahatan selama Maret 2014 sampai dengan Februari 2015. Rendahnya angka kriminalitas di Bolaang Mongondow Timur dimungkinkan karena telah efektifnya tim-tim khusus dari masing-masing Polres di Sulawesi Utara khususnya di Bolaang Mongondow Timur untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Seperti contoh yang terkenal adalah tim Baracuda dari Polda Sulut, tim Paniki dari Polres Kota Manado, Tim Maleo Polres Bolmong dan masih banyak yang lainnya. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan mendekati nol persen, karena mempertahankan suatu prestasi lebih berat dibandingkan dengan membangun.

http://kotamobagukota.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://kotamobagukota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KOTAMOBAGU
Jl. Kinalang, Kota Kotamobagu - 95712, Telp. (0434) 21411, Fax. (0434) 21411
Homepage : http://kotamobagukota.bps.go.id email : bps7174@bps.go.id